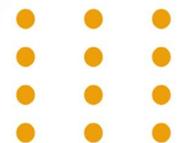
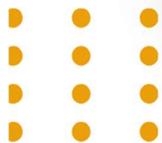




# LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



**BNN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Sutan Syahrir No.251 KM 4 ,Mato Aie, Kecamatan Padang Selatan.Kota Padang

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja yang menggambarkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BNNP Sumatera Barat dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di wilayah Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2020. Hal ini dimaksud bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan bertanggung jawab kepada publik yang diukur secara kualitatif dan kuantitatif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja BNNP Sumatera Barat tahun 2023 merupakan Laporan Kinerja tahun keempat dalam periode RPJMN tahun 2020 - 2024. Dalam laporan ini disajikan tingkat pencapaian sasaran strategis BNNP Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNNP Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

Secara umum BNNP Sumatera Barat berupaya keras untuk melakukan pencegahan, rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkoba dan pemberantasan yang bertujuan untuk memutus rantai peredaran narkoba yang terus meningkat setiap tahunnya.

Diharapkan melalui laporan ini dapat memberi gambaran objektif tentang Kinerja BNNP Sumatera Barat tahun 2023 sekaligus menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada tahun mendatang, serta dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai Kinerja BNNP Sumatera Barat secara keseluruhan.

Demikian, semoga Allah SWT meridhoi usaha kita semua. Amin

**Padang, 29 Januari 2024**  
**Kepala Badan Narkotika Nasional**  
**Provinsi Sumatera Barat**



**Tri Julianto Djatiutomo, S.I.K.,M.M**

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN.
- b. Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Program Kegiatan tersebut di implementasikan melalui 10 (sepuluh) sasaran strategis dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Kegiatan. Dari 19 (sembilan belas) indikator kinerja kegiatan tersebut dapat dikelompoknya sebagai berikut:

1. Capaian sesuai target sebanyak 8 indikator kinerja kegiatan
2. Capaian melebihi target sebanyak 8 indikator kinerja kegiatan
3. Capaian di bawah target sebanyak 3 indikator kinerja kegiatan

Berdasarkan uraian capaian kinerja BNN Proovinsi Sumatera Barat Tahun 2023, menggambarkan bahwa BNNP Sumatera Barat telah melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan dalam pengembangan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dalam pelaksanaannya, BNN Provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaran strategis tersebut melalui Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi dan Bidang Pemberantasan. Selain itu dukungan dan peran serta masyarakat juga sangat berperan dalam pencapaian kinerja di BNN Provinsi Sumatera Barat.

Capaian kinerja ini tidak lepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas.

Pagu anggaran BNN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 untuk mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) adalah sebesar **Rp. 16.175.370.000,-** dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 15.914.581.772,-** atau sebesar **98,39 %** dari total anggaran.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum .....	2
B. Dasar Hukum .....	4
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Serta Struktur Organisasi .....	5
<b>BAB II   PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>9</b>
A. Rencana Strategis / Rencana Program Kerja .....	10
B. Rencana Kinerja Tahunan .....	10
C. Perjanjian Kinerja .....	14
<b>BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>18</b>
A. Analisis Capaian Sasaran.....	19
B. Akuntabilitas Keuangan .....	58
C. Efisiensi Pengguna Sumber Daya .....	59
<b>BAB IV  PENUTUP .....</b>	<b>60</b>

## Lampiran

### Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perjanjian Kinerja BNNP Sumatera Barat TA 2023.....	15
Tabel 2	Realisasi Capaian Kinerja BNNP Sumatera Barat Tahun 2023.....	19
Tabel 3	Rekapitulasi Perhitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARI) Tahun 2023 .....	23
	Rekapitulasi Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) di Lingkungan BNNP Sumatera Barat Tahun 2023 .....	27
Tabel 4	Program Desa Bersinar Tahun 2023 .....	28
Tabel 5	Rekapitulasi Indeks Kemandirian Partisipasi di Lingkungan BNNP Sumatera Barat Tahun 2023 .....	31
Tabel 6	Kawasan/ Wilayah Rawan Narkoba yang dintervensi Program Pemberdayaan Alternatif Tahun 2023 .....	33
Tabel 7	Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih BNNP dan BNNKab/Kota Tahun 2023 .....	36
Tabel 8	Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 .....	41
Tabel 9	Hasil Survey Kajian Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi di BNNP Sumatera Barat dan jajarannya Tahun 2023 .....	43
Tabel 10	Jumlah Tahanan Masuk dan Tahanan Keluar pada Proses Penyidikan TA 2023.....	46
Tabel 11	Jumlah Barang Bukti Narkotika pada Proses Penyidikan 2023 .....	48
Tabel 12	Jumlah Barang Bukti Non Narkotika pada Proses Penyidikan 2023 .....	48
Tabel 13	Penghitungan Nilai Kinerja Anggaran BNNP Sumatera Barat TA. 2023	54
Tabel 14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Sumatera Barat dan BNNKab/kota Tahun 2023 .....	57
Tabel 15	Alokasi Anggaran BNNP Sumatera Barat TA. 2023 .....	58
Tabel 16	Alokasi Anggaran BNNP Sumatera Barat TA. 2023 Berdasarkan Sumber Dana .....	59
Tabel 17		

## **LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Perjanjian Kinerja BNNP Sumatera Barat**
- Lampiran 2 Perjanjian Kinerja BNN Kota Payakumbuh**
- Lampiran 3 Perjanjian Kinerja BNN Kota Sawahlunto**
- Lampiran 4 Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Solok**
- Lampiran 5 Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Pasaman Barat**





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

- A. GAMBARAN UMUM**
- B. DASAR HUKUM**
- C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI  
SERTA STRUKTUR ORGANISASI**

## **A. GAMBARAN UMUM**

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah termasuk BNN wajib mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga, yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa serta memiliki kinerja yang baik ( Good Governance ).

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang berkembang begitu pesat dan sangat mengkhawatirkan merupakan kejahatan yang bersifat lintas negara (*transnational crime*), suatu kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) dan terus berkembang serta menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial ekonomi, keamanan dan mengakibatkan hilangnya satu generasi di masa depan. Peredaran Narkoba saat ini sudah merambah ke seluruh wilayah dan berbagai lapisan masyarakat yang mana sasaran dari peredaran narkoba bukan hanya tempat-tempat hiburan malam tetapi juga ke daerah pemukiman, kampus, sekolah-sekolah, rumah kos dan bahkan lingkungan rumah tangga.

Permasalahan ini memerlukan penanganan yang serius dan kerjasama dari seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara. Untuk menanggulangi permasalahan narkoba tersebut, BNNP Sumatera Barat melakukan berbagai upaya melalui Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi dan Pemberantasan. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, BNN melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, dan Bidang Pemberantasan. Selain itu juga diperlukan komitmen bersama para aparat penegak hukum, Aparatur Sipil Negara dan seluruh komponen masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Sumatera Barat.

Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Provinsi Sumatera Barat, dimana permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di

wilayah provinsi Provinsi Sumatera Barat adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah:

a. Keadaan Geografis

Provinsi Sumatera Barat secara astronomis terletak antara 0o 54' Lintang Utara dan 3o 30' Lintang Selatan dan antara 98o 36' - 101o 53' Bujur Timur. Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah pulau Sumatera dan mempunyai luas wilayah sekitar 42,01 ribu Km<sup>2</sup> . Provinsi Sumatera Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu dan Samudera Indonesia. Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten/Kota. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas, yaitu 6,01 ribu Km<sup>2</sup> atau sekitar 14,31 % dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil, yakni 23,0 Km<sup>2</sup> (0,05%). Provinsi Sumatera Barat memiliki 218 pulau yang tersebar di 7 Kabupaten/ Kota yaitu Kab. Kepulauan Mentawai (113 pulau), Kab. Pesisir Selatan (48 pulau), Kab. Padang Pariaman (1 pulau), Kab. Agam (2 pulau), Kab. Pasaman Barat (26 pulau), Kota Padang (21 pulau), Kota Pariaman (4 pulau) dan yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Barat (3 pulau).

Jalur laut menjadi jalur favorit penyelundupan narkoba ke Indonesia dengan menggunakan kapal penumpang, kapal tradisional, atau speedboat, para pengedar narkoba beraksi di perairan Indonesia. Narkoba masuk ke Provinsi Sumbar (85%) melalui jalur laut selebihnya udara dan daratan lewat perbatasan-perbatasan. Di provinsi Sumatera Barat narkoba masuk melalui sepanjang daerah pesisir pantai (Tiku, Pariaman, Padang, Painan, Kambang dan Kepulauan Mentawai).

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Kebutuhan sumber daya manusia yang ada pada Satker BNN Provinsi Sumatera Barat masih sangat kurang. Jumlah keseluruhan personil pada BNN Provinsi Sumatera Barat ASN 26 orang, Polri 11 orang, PPNPN 25 orang. Berdasarkan ketentuan Daftar Susunan Pegawai pada Provinsi sebanyak 211 Orang.

Kebijakan yang dilakukan BNNP Sumatera Barat dalam menangani permasalahan narkoba yaitu penanganan secara seimbang, terintegrasi dan komprehensif antara *demand reduction* dan *supply reduction*. Implementasi dari kebijakan tersebut yaitu melakukan sosialisasi dan penyuluhan P4GN secara masif ke semua lini seperti dilingkungan instansi pemerintah, swasta, pendidikan, pelaku usaha dan seluruh komponen masyarakat. BNNP Sumatera Barat juga berupaya melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ke seluruh lapisan masyarakat dengan mengintegrasikan program P4GN melalui konsep pembangunan berwawasan anti narkoba, menumbuhkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam program P4GN dari tingkat desa/kelurahan dengan mendorong relawan-relawan anti narkoba menjadi pelaku P4GN secara mandiri, melakukan rehabilitasi bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba serta menangkap para pelaku kejahatan narkoba yang berada diwilayah Provinsi Sumatera Barat tanpa pandang bulu.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Kepala BNNP Sumatera Barat kepada Kepala BNN dan para pemangku kepentingan lainnya atas pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diperjanjikan pada awal tahun anggaran 2023.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

## **C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI**

### **1. Kedudukan**

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi. BNNP berkedudukan di ibukota Provinsi. BNNP berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional dan dipimpin oleh Kepala.

### **2. Tugas Pokok**

BNNP Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di wilayah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

### **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, BNNP menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya di sebut P4GN dalam wilayah Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;

- c. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
- d. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- f. Pelayanan administrasi BNNP;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

#### **4. Kewenangan**

Kewenangan BNNP secara umum secara implisit terlihat pada tugasnya. Namun, kewenangan yang dikhususkan undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkoba, BNNP berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

#### **5. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, susunan organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Bagian Umum
- c. Bidang Pemberantasan dan Intelijen
- d. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

## STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT



adapun organisasi dan tata kerja BNNP Sumatera Barat dan BNNK jajaran Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:



### 6. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat pada Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) disusun dengan sistematika sebagai berikut:



## **Pendahuluan**

Menyajikan tentang latar belakang penyusunan laporan kinerja, kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi BNN



## **Perencanaan Kinerja**

Menyajikan informasi tentang Rencana Program Kerja yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Selain itu juga menyajikan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2023.



## **Akuntabilitas Kinerja**

Menyajikan informasi tentang kinerja sasaran strategis dan capaian Indikator Kinerja BNN Tahun 2023. Selain itu juga menyajikan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 2023.



## **Penutup**

Menyajikan simpulan umum capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilaksanakan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya



## **Lampiran**

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain – lainnya yang dianggap perlu



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA**

- A. RENCANA STRATEGIS/ RENCANA PROGRAM  
KERJA**
- B. RENCANA KINERJA TAHUNAN**
- C. PERJANJIAN KINERJA**

## **A. RENCANA STRATEGIS / RENCANA PROGRAM KERJA**

Kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Sumatera Barat merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Kebijakan dan strategi BNN tahun 2020-2024 adalah:

1. penguatan pengawasan jalur penyelundupan narkoba;
2. peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;
3. pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat;
4. peningkatan kapabilitas rehabilitasi;
5. penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah provinsi. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Provinsi Sumatera Barat juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Provinsi Sumatera Barat sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah
2. Memperkuat kerja sama dengan stakeholder terkait P4GN
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi relawan narkoba, penggiat anti narkoba, Agen Pemulihan sebagai perpanjangan tangan BNN Provinsi Sumatera Barat
4. Pembentukan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai wadah pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkoba
5. Meningkatkan Informasi dan Layanan Publik
6. Menambahkan Jumlah Sumber Daya Manusia

## **B. RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat menetapkan rencana kinerja Tahun 2023 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2023. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah provinsi bersama seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Adapun rencana

target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>KEBUTUHAN PENDANAAN</b>
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kab/kota	Rp. 370.249.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kab/kota	Rp. 502.232.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	4 Kab/kota	Rp. 1.093.226.000
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	Rp. 121.622.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	2,60 Indeks	-
		Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	50 %	-
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	50 Orang	Rp 184.236.000
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	2 Orang	-
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	2 Lembaga	Rp 922.580.000
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	10 Unit	-
		Meningkatnya kualitas Layanan rehabilitasi narkoba	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	3,1 Indeks	-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
7.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	22 Berkas	Rp 995.458.000
8.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 %	Rp 279.870.000
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 %	-
9.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	89 %	Rp 112.952.000
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	4 Kabupaten/ Kota	-
10.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks	Rp. 4.605.784.000
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 Kabupaten/ kota	-
11.		Meningkatnya Pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	75 Indeks	

### C. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian Kinerja menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai.

BNN sebagai instansi vertikal dari BNN memiliki visi, misi dan tujuan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:



Adapun tujuan yang ditetapkan adalah:

1. Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba;
2. Mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas.

Upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan dalam rangka peningkatan penanganan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba ditetapkan perjanjian kinerja. Melalui perjanjian kinerja ini terwujudlah komitmen dan kesepakatan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam perjanjian kinerja berisikan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai melalui program dan kegiatan Lembaga/instansi. Adapun Perjanjian BNNP Sumatera Barat Tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 1.**  
**Perjanjian Kinerja BNNP Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kab/kota
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kab/kota
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	4 Kab/kota
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	2,60 Indeks
5.	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami	50 %

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA
			peningkatan kualitas hidup	
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	50 Orang
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	2 Orang
7.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	2 Lembaga
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	10 Unit
8.	Meningkatnya kualitas Layanan rehabilitasi narkotika	Meningkatnya kualitas Layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	3,1 Indeks
9.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	22 Berkas
10.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 %
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 %
11.	Penyusunan dan Pengembangan	Meningkatnya proses manajemen kinerja	Nilai Kinerja Anggaran	83 %

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
	Rencana Program dan Anggaran BNN	secara efektif dan efisien	Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	4 Kabupaten/ Kota
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 Kabupaten/ kota
13.	Meningkatnya Pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Meningkatnya Pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	75 Indeks



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**  
A. ANALISIS CAPAIAN  
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

## A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Dalam rangka pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang telah diuraikan diatas, BNNP Sumatera Barat telah berupaya semaksimal mungkin agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal, efisien, efektif transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Perjanjian kinerja BNNP Sumatera Barat tahun 2023 menetapkan 13 (tiga belas) sasaran kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan sebanyak 19 (sembilan belas) indikator. Disamping itu BNNP Sumatera Barat juga melakukan berbagai kegiatan pendukung lainnya dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja di wilayah Sumatera Barat.

**Tabel 2.**  
**Realisasi Capaian Kinerja BNNP Sumatera Barat Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	3 Kab/Kota	75 %
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	100 %
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian	3 Kab/Kota	4 Kab/kota	4 Kab/Kota	100 %

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	dalam penanganan P4GN	Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi				
4.	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	100 %
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	2,86 Indeks	2,60 Indeks	3,55 Indeks	136 %
5.	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	-	50 %	56,25 %	112,5 %
6.	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	31 Orang	50 Orang	60 Orang	120 %
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	N/A	2 Orang	4 Orang	200 %
7.	Meningkatnya aksesibilitas dan	Jumlah lembaga	1 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	100 %

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi				
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	6 Unit	10 Unit	10 Unit	100 %
8.	Meningkatnya kualitas Layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	3,327 Indeks	3,1 Indeks	3,40 Indeks	109 %
9.	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	32 Berkas	22 Berkas	41 Berkas	186 %
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 %	100 %	100 %	100 %
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 %	100 %	100 %	100 %
11	Meningkatnya proses	Nilai Kinerja Anggaran	82,21 %	83 %	94,19 %	113 %

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
	manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	1 Kabupaten / Kota	4 Kabupaten / Kota	2 Kab/Kota	50 %
12	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97,06	92 Indeks	96,93 indeks	105 %
		Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 Kabupaten / kota	4 Kabupaten / kota	4 Kabupaten / kota	100 %
13	Meningkatnya Pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	-	75 Indeks	71,22 Indeks	94, 96 %

Pengukuran tingkat capaian kinerja pada BNNP Sumatera Barat dilakukan dengan pemantauan dan evaluasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat. Tingkat capaian kinerja BNNP Sumatera Barat selama tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat dalam bentuk tabel dan narasi.

<b>1.</b>	<b>Sasaran : Meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba</b>
-----------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	3 Kab/Kota	75

Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi				
--	--	--	--	--

Definisi Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba. Untuk mencapai target Indikator Kinerja Kegiatan tersebut, harus diketahui terlebih dahulu dengan pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba atau disingkat DEKTARI di masing-masing BNN Kabupaten/Kota.

Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan diri pada kalangan remaja secara sampling pada 4 (empat) kabupaten/kota wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan instrumen ukur ketahanan diri ( Anti Drug Scale) yang mencakup 3 dimensi, yaitu :

- a. **Self Regulation** yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri
- b. **Assertiveness** yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas.
- c. **Reaching Out** yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

**Tabel 3.**  
**Rekapitulasi Perhitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba ( DEKTARI) Tahun 2023**

No.	Unit Vertikal	Nilai Dektari	Kategori
1	BNNP Sumatera Barat	48, 41	Rendah
2	BNN Kota Payakumbuh	55,36	Sangat Tinggi
3	BNN Kota Sawahlunto	55,36	Sangat Tinggi
4	BNN Kabupaten Solok	54,13	Sangat Tinggi

5	BNN Kabupaten Pasaman Barat	49,36	Rendah
<b>DEKTARI PROV. SUMATERA BARAT</b>		<b>52,52</b>	<b>Tinggi</b>

Dari data diatas jumlah kabupaten/ kota dengan indeks ketahanan diri reamja terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah Bali berkategori *Sangat Tinggi* yaitu sebanyak 3 (tiga) kabupaten/kota dan sebanyak 1 (satu) kabupaten/kota berkategori *Rendah*.

Dari tabel diatas diketahui bahwa penghitungan Dektari menggunakan aplikasi *mobile* Dektari Aja terhadap remaja usia 12 – 21 tahun ( pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/ sosialisasi oleh BNN PROVINSI dan BNNK. Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2023 adalah 52, 52 (Kategori Tinggi) dengan target angka 53 ( Kategori Tinggi).

Adapun klasifikasi hasil capaian sebagai berikut:

- 1) Kategori Sangat Tinggi (  $\geq 53, 71$  )
- 2) Kategori Tinggi ( 49,74 – 53, 50 )
- 3) Kategori Rendah ( 45, 98 – 49,73 )
- 4) Kategori Sangat Rendah (  $\leq 45, 97$  )

Berdasarkan kegiatan pengelolaan informasi dan edukasi BNNP Sumatera Barat diperoleh Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahguna Narkoba **52, 52 ( Kategori Tinggi )**. Artinya, Kemampuan Remaja Sumatera Barat untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba tinggi.

**Formula Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	$\Sigma(b/a) \times 100$	$= 5/3 \times 100$ $= 166 \%$	$\Sigma$ = Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi <b>A</b> = Jumlah target kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" <b>B</b> = Jumlah realisasi kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi"

Dari penghitungan di atas, dapat dilihat BNNP Sumatera Barat bahwa Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi tercapai 3 kabupaten/kota Hal ini dapat disimpulkan bahwa target capaian BNNP Sumatera Barat pada indikator tersebut adalah 75%.

Adapun yang menjadi faktor keberhasilan diantaranya:

1. Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi
2. Tingginya antusiasme dari remaja yang mengikuti kegiatan penyuluhan / sosialisasi mengenai bahaya Narkoba
3. Partisipasi para siswa yang tergabung dalam Duta Sinar untuk menjadi agen BNN di lingkungan sekolahnya.
4. Responden dapat mengisi kuisisioner sesuai petunjuk yang diberikan saat kegiatan sosialisasi/ penyuluhan.
5. Pemanfaatan teknologi yang mempermudah dalam berkomunikasi

Sedangkan faktor kegagalan nilai evaluasi tidak tercapai yang terjadi pada BNNP Sumatera Barat dikarenakan kegiatan penyebaran informasi di Automatic Adjustment (blokir). Sedangkan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan narkoba yang tidak mencapai target pada BNNK Pasaman Barat dikarenakan pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah penginputan data evaluasi.

Langkah-langkah tindak lanjut yang dilakukan dalam upaya meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah kerjasama dengan media tidak saja dalam hal penempatan konten, tetapi juga dalam pembuatan konten-konten yang kreatif yang dapat menarik selain itu adanya bimbingan lebih lanjut dalam pengisian kuisisioner terhadap remaja. Kemudian untuk memenuhi target pengisian Dektari 100 orang pada Tahun 2023 diperoleh dari kegiatan penyuluhan Non DIPA.

Sebagai rekomendasi kedepan kegiatan pelatihan soft skill dapat mengakomodir minimal 100 orang peserta untuk pengisian kuisisioner Dektari. Sebaiknya untuk menunjang nilai ADS, data evaluasi sebaiknya tidak saja berasal

dari kegiatan DIPA tetapi juga NON DIPA agar sinkron nilai ADS dan data sekunder yang diperoleh dari kegiatan DIPA dan NON DIPA.

Inovasi yang telah dilakukan selama tahun 2024 dalam upaya meningkatkan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba diantaranya :

1. Kerjasama dengan media tidak saja dalam hal penempatan konten, tetapi juga dalam pembuatan konten-konten yang kreatif, sarat makna dan disesuaikan dengan kearifan lokal;
2. Melakukan pelayanan publik keliling ;
3. Pelaksanaan lomba kreatif tingkat sekolah menengah;
4. Pencapaian target 100 orang remaja yang mengisi kuisioner Dektari diantisipasi melalui kegiatan penyuluhan NON DIPA.

<b>2.</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika</b>
-----------	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
<b>1.</b>	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 kabupaten/ kota	4 kabupaten/ kota	4 kabupaten/ kota	100

Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai Tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dari anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal.

Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi adalah Jumlah kabupaten/kota yang keluarganya memiliki kemampuan untuk untuk terhindar dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dengan Indeks Ketahanan Keluarga 78,69 (kategori tinggi).

Dimensi ketahanan keluarga anti narkoba adalah system keyakinan, proses organisasi dan proses komunikasi yang merupakan upaya melibatkan peran keluarga dalam program ketahanan keluarga anti narkoba guna kelangsungan hidup sehat dari penyalgunaan narkoba.

Perhitungan indeks ketahanan keluarga menggunakan cara survei ketahanan keluarga secara sampling pada 4 kabupaten/kota dengan menggunakan instrument *SDQ ( Strengths dan Difficulties Quesiionares)*, *PAFAS (Parent and Family Adjusmnet Scales)*, dan *CYRM (Child and Youth Resiliences Measure)*.

Kegiatan yang dilakukan dalam mencapai kegiatan tersebut dengan melakukan intervensi ketahanan keluarga anti narkoba terhadap 10 keluarga (20 orang) pada setiap wilayah BNNP dan BNNKab/Kota serta melakukan pengisian kuisisioner Dektara.

**Tabel 4.**  
**Rekapitulasi Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap**  
**Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA)**  
**di Lingkungan BNNP Sumatera Barat TA. 2023**

NO.	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	BNNP Sumatera Barat	90,089	Sangat Tinggi
2	BNN Kota Payakumbuh	94,911	Sangat Tinggi
3	BNN Kota Sawahlunto	86,696	Tinggi
4	BNN Kabupaten Solok	88,036	Tinggi
5	BNN Kabupaten Pasaman Barat	80,089	Tinggi

Dari table diatas diketahui bahwa perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNKab/Kota dan BNNP memilih Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diampel sampel dari keluarga yang telah di intervensi ( keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua ). Hasil angka perhitungan Dektara Tahun 2023 adalah 85,389 ( Kategori Tinggi ) dengan target angka 78, 69 ( Kategori Tinggi ). Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut:

- 1). Kategori sangat tinggi ( 88,31 – 100,0)
- 2). Kategori tinggi ( 76, 61 – 88,30 )
- 3). Kategori rendah (65, 00 – 76, 60 )
- 4). Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99)

Program ketahanan keluarga diawali dengan Rapat Koordinasi dan melaksanakan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba berbasis sumber daya desa (Desa bersinar) tahun 2023, sebagai berikut :

**Tabel 5.**  
**Program Desa Bersinar Tahun 2023**

<b>Satker</b>	<b>Desa Bersinar</b>
BNN Provinsi Sumatera Barat (2 Desa/Nagari)	Kelurahan Indarung, Kec. Lubuk Kilangan Nagari Buayan Lubuk Alung, Kec. Batang Anai
BNN Kabupaten Solok (2 Desa/Nagari)	Nagari Solok Laweh Nagari Gaung
BNN Kota Sawahlunto (2 Desa/Nagari)	Desa Talawi Hilir Desa Kolok Nan tuo
BNN Kabupaten Pasaman Barat (2 Desa/Nagari)	Nagari Muaro Kiawai Nagari Rabi Jonggor
BNN Kota Payakumbuh (2 Desa/Nagari)	Kel. Koto Panjang Dalam Kel. Balai Tongah Koto

Dari target yang ditetapkan BNN Provinsi Sumatera Barat telah mencapai Indeks Ketahanan Keluarga berkategori ***Tinggi – Sangat Tinggi***.

Adapun faktor keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan diantaranya:

1. Dukungan stakeholder kelurahan dalam melaksanakan kegiatan intervensi ketahanan keluarga.
2. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam fasilitasi kegiatan intervensi ketahanan keluarga.
3. Tingginya antusias Keluarga untuk menciptakan lingkungan bebas narkoba di Lingkungannya
4. Sistem keyakinan yang merupakan nilai, pendirian sikap yang menjadi pedoman dalam fungsi keluarga sudah berjalan dengan baik.
5. Proses organisasi struktur keluarga untuk mendukung unit keluarga dan anggota dalam menghadapi ancaman narkoba sudah berjalan dengan baik. Keluarga mampu mendukung satu sama lain dalam berbagai hal.

Sedangkan faktor kegagalan dari pelaksanaan kegiatan ini diantaranya:

1. Indikator yang bisa dijadikan acuan dalam pencapaian target kinerja tidak dijelaskan secara terperinci pada awal penginputan sehingga hasil pengisian tidak transparan dan tidak real time.
2. Kurangnya kepedulian keluarga di kab/kota.
3. Dimensi proses komunikasi yang belum dipahami/berjalan secara baik oleh peserta kegiatan

Upaya yang dilakukan dalam mencapai indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahguna narkoba (DEKTARA) adalah :

1. Menciptakan fasilitas dan media pendukung kegiatan intervensi ketahanan keluarga yang baik.
2. berkoordinasi dengan Lurah, Camat dan Nagari setempat.
3. Melakukan pemantauan berkala terhadap kebijakan pemerintah dalam mendukung program ketahanan keluarga.

Inovasi yang telah dilakukan selama tahun 2023 dalam upaya meningkatkan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba diantaranya:

1. Melakukan Informasi Edukasi keliling melalui mobil sosialisasi;
2. Materi dalam kegiatan tersebut tersedia dalam bentuk hardcopy yang dibagikan kepada peserta saat pertemuan terakhir dan bisa diakses oleh peserta melalui link/bit.ly yang disediakan.

<b>3.</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN</b>
-----------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.	Jumlah kabupaten / kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori " Mandiri " di wilayah Provinsi	3 Kabupaten /kota	4 Kabupaten /kota	4 Kabupaten /kota	100

Program pemberdayaan anti narkoba pada 2023 melalui indikator kinerja 'Indeks Kemandirian Partisipasi' (IKP) sedangkan untuk BNNKab/Kota berfokus pada pembentukan Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membangun kemitraan dan sinergitas dengan target menjadikan lembaga/institusi/lingkungan masyarakat aktif, mandiri, sukarela dan berkelanjutan mensosialisasikan program P4GN serta terbentuknya penggiat anti narkoba.

Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian Masyarakat (para Penggiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam Upaya P4GN yang terdiri dari : lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan Pendidikan dan lingkungan Masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban , dll) dan Masyarakat rawan dan rentan narkoba.

Adapun instrument untuk mengukur indkes tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variable sebagai berikut:

- a. **SDM**, adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figure yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya;
- b. **Metode**, adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (pelatihan , konseling, dan Pelaksanaan Tes Urine) atau Kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
- c. **Anggaran**, adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing-masing.
- d. **Material**, adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- e. **Sistem (kebijakan)**, adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
- f. **Aktivitas**, adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

Kegiatan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN berupa rapat kerja, pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat berupa workshop dan bimbingan teknis anti narkoba. Dalam mencapai target dilakukan dengan pengisian kuestioner IKP dari perhitungan nilai IKP

terhadap lingkungan pemerintah, masyarakat dan pendidikan di Kab / Kota yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan P4GN yang berupa adanya rapat kerja, pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat, workshop . bimbingan teknis anti narkoba. Hasil erhitungan kuesioner penilaian IKP yang telah dibagi ke masing-masing kabupaten/kota didapat hasil sebagai berikut:

- ✓ 1,00 – 1,75 : Tidak Mandiri
- ✓ 1,76 – 2,50 : Kurang Mandiri
- ✓ 2,51 – 3,25 : Mandiri
- ✓ 3,26 – 4,00 : Sangat Mandiri

Perhitungan dilakukan dengan rumus :

$$IKP = \frac{\text{Hasil penghitungan kuisioner}}{25}$$

**Tabel 6.**  
**Rekapitulasi Indeks Kemandirian Partisipasi di Lingkungan BNNP Sumatera Barat TA. 2023**

NO	LINGKUNGAN	SATKER				
		BNNP SUMBAR	BNNK PAYAKUMBUH	BNNK SAWALUNTO	BNNK SOLOK	BNNK PASAMAN BARAT
1	PEMERINTAH	3.61 Sangat Mandiri	3,83 Sangat Mandiri	3.68 Sangat Mandiri		3,68 Sangat Mandiri
2	SWASTA	-	-	-	-	-
3	MASYARAKAT		3,87 Sangat Mandiri		3,58 Sangat Mandiri	3,46 Sangat Mandiri
4	PENDIDIKAN	3,57 Sangat Mandiri		3,33 Sangat Mandiri	3,97 Sangat Mandiri	
<b>TOTAL</b>		3,57 Sangat Mandiri	3,85 Sangat Mandiri	3,535 Sangat Mandiri	3,775 Sangat Mandiri	3,57 Sangat Mandiri

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori " Mandiri " tercapai oleh 4 kabupaten /kota.

Faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah: terbentuknya penggiat anti narkoba yang berkerja secara suka rela.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam meningkatkan institusi/lembaga yang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba, diantaranya:

1. Memaksimalkan peran serta para penggiat anti narkoba guna mendukung program P4GN;
2. Meningkatkan pengetahuan penggiat anti narkoba secara berkala dan berkesinambungan;
3. Memantau dan melakukan pendekatan agar stakeholder terkait melaksanakan program P4GN di lingkungan masing – masing.

<b>4.</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan</b>
-----------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
<b>1.</b>	Jumlah Kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "bahaya" menjadi " waspada"	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	100
<b>2.</b>	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	2,85 Indeks	2,60 Indeks	3,55 Indeks	136

Status keterpulihan suatu Kawasan ditentukan berdasarkan indeks keterpulihan suatu Kawasan rawan narkoba yagn telah diintervensi program pemebrdayaan Masyarakat. Upaya untuk memulihkan kawasan/ wilayah rawan Narkoba dapat memaksimalkan potensi pada kawasan tersebut dengan arah yang positif melalui rapat kerja, audiensi, bimbingan teknis stakeholder dan pendampingan dalam rencana aksi, pelatihan lifeskill, dan pembinaan masyarakat anti narkoba.

Dalam melakukan pemberdayaan alternatif pada kawasan/wilayah rawan terlebih dahulu dilakukan pemetaan , agar kegiatan pembinaan yang akan diberikan tepat sasaran khususnya di Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lampasi Tigo

Nagari Kota Payakumbuh. Selanjutnya dilakukan pengisian kuisisioner IKKR , kuisisioner SKM, dan kuisisioner program dan kegiatan kewirausahaan.

Indikator keberhasilan ini merupakan ukuran sejauhmana intervensi program berhasil, berlanjut dan dirasakan masyarakat, dengan beberapa item pengukuran, antara lain :

- ✚ Penyelenggaraan program
- ✚ Pelaksana program
- ✚ Keberlanjutan program
- ✚ Sinergi instansi pemerintah
- ✚ Kemitraan dunia usaha
- ✚ Perlibatan organisasi sosial masyarakat
- ✚ Hasil program yang dirasakan masyarakat

**Tabel 7.**  
**Kawasan/Wilayah Rawan Narkoba yang diintervensi**  
**Program Pemberdayaan Alternatif TA. 2023**

No	Nama Kawasan/Wilayah	Jumlah yang dibina	Jenis Life Skill	Stakeholder yang terlibat	Bentuk Keterlibatan
1	Masyarakat Kawasan Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh	15 orang	Pelatihan Paparan Karangian Bunga Ucapan Selamat/Berduka	Bank Nagari dan BNI	Instruktur / Pelatih / Sarana berupa Papan Bunga

Pemberdayaan yang dilakukan berupa pelatihan *life skill* Pelatihan Papan Karangian Bunga Ucapan Selamat/Berduka. Kegiatan diikuti oleh 15 (lima belas) orang peserta yang terdiri dari mantan pecandu di Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh.

Pelatihan *life skill* ini terwujud karena adanya dukungan dari stakeholder yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dari narkoba, mandiri dan produktif.

Faktor keberhasilan pelaksanaan kegiatan diantaranya: Terciptanya Kawasan bebas narkoba yang bersinergi dengan pencaangan Desa Bersinar dan pelaksanaan kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) serta tingginya komitmen masing-masing stakeholder dalam mendukung pelaksanaan pemberdayaan alternatif.

Sedangkan untuk nilai keterpulihan Kawasan rawan yang diintervensi 1 kawasan berkategori 2,85 ( siaga) dihitung dengan cara :

$$\text{Nilai IKKR} = \frac{\text{Total Jumlah Responden}}{\text{Jumlah Bobot}}$$

Dengan rincian sebagai berikut :

Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Koto Payakumbuh berkategori **WASPADA** beralih status keterpuliannya menjadi **AMAN** dengan **IKKR 3,55**

<b>5.</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba</b>
-----------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
<b>1.</b>	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	50 %	56,25 %	112,5 %

Program pasca rehabilitasi merupakan suatu program kelanjutan sebagai bentuk upaya pendampingan BNN terhadap klien, yakni mantan penyalahguna narkoba. Program pasca rehabilitasi ini diperlukan karena adiksi atau ketergantungan ini merupakan salah satu penyakit kronis yang mudah mengalami kekambuhan. Adapun penyebab kekambuhan diantaranya ialah ketidakmampuan klien dalam menghadapi trigger, tidak produktif atau tidak memiliki pekerjaan, hingga tidak mendapatkan dukungan sosial atau lingkungan sekitarnya.

Kegiatan pengukuran kualitas hidup (layanan pasca rehabilitasi) telah dilakukan terhadap terhadap 30 (tiga puluh) orang klien yang telah menyelesaikan program rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNN Kota Sawahlunto. Kegiatan yang dilakukan berupa pemantauan ke tempat klien yang sudah disepakati sebelumnya (home visite) untuk memberikan dukungan awal pemulihan kepada klien. Penilaian terdiri dari 4 domain yaitu: Domain kesehatan fisik, Domain psikologi, Domain sosial, Domain

lingkungan, dan dilanjutkan dengan tes urin serta pengisian form WHOQoL oleh klien. Nilai ini didapat dari perhitungan WHOQoL pada awal kegiatan dan WHOQoL yang diambil di akhir kegiatan. Cara melakukan perhitungan persentase capaian adalah dengan melakukan perhitungan jumlah klien yang meningkat kualitas hidupnya, dilihat dari WHOQoL akhir, dibagi dengan total target pasca dikali dengan 100, maka akan didapat nilai persentase klien yang akan meningkat taraf hidupnya.

Dalam hal ini nilai yang didapat oleh masing- masing klien mengalami peningkatan, sehingga hal ini bisa diartikan bahwa masing- masing klien mengalami peningkatan kualitas hidup. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempertahankan kepuhlian klien dan memperbaiki kualitas hidup dari klien tersebut.

Indikator ini masuk dalam Perjanjian Kinerja di tahun 2023, sehingga belum ada pembandingan capaian dan proses evaluasi dari pelaksanaan tahun sebelumnya.

<b>6.</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi</b>
-----------	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	31 Orang	50 orang	60 Orang	120

Definisi operasional dari jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota Masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM yang disebut sebagai Agen pemulihan. Agen Pemulihan sebagaimana dimaksud adalah perorangan yang dilatih dan diberikan pembekalan teknis oleh BNN agar mampu menyelenggarakan layanan rehabilitasi kategori resiko rendah sesuai dengan Juknis IBM di masing-masing lokasi.

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

Pada indikator kinerja jumlah petugas penyelenggaraan IBM merupakan jumlah petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis oleh BNNP dan BNNKab/Kota dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 8.**  
**Petugas Penyelenggara layanan IBM yang terlatih BNNP dan BNNKab/Kota TA. 2023**

No	Satker	Nama Agen Pemulihan	Lokasi
1	BNNP Sumatera Barat	Afrinaldi	Nagari Buayan Lubuk Alung Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman
		Edi Koan Zuniyanto	
		Agung Eko Saputra	
		Hendor Hozana	
		Arif Rahman	
		Dasril Gazali	Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang
		Darmaizen	
		Ambrizal	
		Refwildon	
		Syafrizal	
2	BNN Kota Payakumbuh	Alhadi Hamid	Kel. Balai Tongah Koto Kec. Payakumbuh Utara
		Ernatati	
		Masayu Damanik	
		Minda Mora	
		Winda Sulastri	
		Jimmy Mursailles	Kel. Koto Panjang Kec. Lamposi Tigo Nagori
		Beni Mulyanto	
		Zulfikar	
		Aidil Hadi	
		Despita Reni	
		Syawal	
		Santi Alminda	
		Joni Erianto	
		Riki Ananda	
Riko Panuntun			
3	BNN Kota Sawahlunto	Asri Yozi, ST	Desa Kolok Nan Tuo
		M. Assidiqis Salim	
		Askonda Ariadi	
		Susri Hidayati	
		M. Zaki Kurniawan	

		Riri Ramel Afrida	
		Muhammad Rezky Ramadhani	
		Nofrian Hidayat	
		Fanisa Meliam Audina, ST	
		Aulia Rizky Fauzan	
		Syamsi Nurdin	Desa Talwi Hilie
		Benny Zartika	
		Vebby Indra Kurniawan	
		Agus Helia, S.Kom	
		Dian Ramayulis	
<b>4</b>	BNN Kabupaten Solok	Rio Ramadhan	Nagari Gaung Kec. Kubuh Kab. Solok
		Wisdarlia	
		Baidarlis	
		Susrianti	
		Aprozal. D	
		Defrinaldo, A.Md.,Kep	Nagari Saok Laweh Kec. Kubung Kab. Solok
		Yoda Eka Saputri, A.Md.Keb	
		Silvi Delfalia, S.Tr.Keb	
		Nurnita, A.Md.,Keb	
		Fitra, A.Md.Keb	
<b>5</b>	BNN Kabupaten Pasaman Barat	Ade Praman Putra< S.Pd	Nagari muara Kiawai Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat
		Doni	
		Sunarti	
		Anton Maulana	
		Ozi Saputra	
		Roni Kumala	Nagari Rabi Jonggor Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat
		Weni Nopbara	
		Warta Irawan	
		Sulkani	
		Nelvita	

Selama tahun 2023 tercatat sebanyak **97 orang klien** yang di fasilitasi oleh Agen Pemulihan untuk mendapatkan layanan rehabilitasi.

Faktor keberhasilan dalam pencapaian indikator jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih yaitu

1. Background (Profesi) dari masing-masing AP dan komitmen dari masyarakat atau pemerintah setempat dalam mendukung aktivitas IBM.

Kurangnya pemahaman tentang pentingnya rehabilitasi di masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi agen pemulihan dalam melaksanakan tugas mereka di lapangan.

Adapun yang menjadi kendala pada pelaksanaan kegiatan diantaranya:

1. Menyesuaikan jadwal Agen Pemulihan (AP) dengan layanan yang diberikan kepada klien secara umum yang masih berstatus pelajar/ sekolah
2. Dukungan pemerintah daerah belum maksimal terutama dalam segi anggaran untuk keberlangsungan program IBM di tahun berikutnya.

Langkah-langkah tindak lanjut yang dilakukan dalam mengatasi kendala diantaranya :

1. Tetap memotivasi agen pemulihan agar pelaksanaan kegiatan IBM dapat berjalan sesuai dengan harapan;
2. berkoordinasi dengan aparatur Pemerintah setempat dalam mendukung kegiatan IBM.

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
2.	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	N/A	2 orang	4 orang	200 %

Definisi operasional dari petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis merupakan petugas pelaksana layanan rehabilitasi yang telah mengikuti peningkatan kompetensi teknis dan tersertifikasi sesuai bidangnya (dokter, perawat, konselor adiksi, psikolog, pekerja sosial).

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan rehabilitasi pada Lembaga rehabilitasi (baik dokter, perawat, konselor adiksi, psikolog, pekerja sosial) yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan rehabilitasi narkoba dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi narkoba dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

Pada indikator ini, pelaksanaan kegiatan pada Uji Sertifikasi pada BNNP Sumbar tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dikarenakan adanya Automatic Adjustment (Blokir Anggaran). Namun tahun 2023, diselenggarakan oleh

Deputi Rehabilitasi Uji Kompetensi di LSP BNN Pada tanggal 13 November 2023 di Jakarta. Terdapat sebanyak 4 (empat) orang yang lulus uji sertifikasi.

Adapun faktor keberhasilan pencapaian target jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis adalah:

- a. pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang efektif, efisien dan tepat sasaran
- b. hubungan dan kerjasama yang baik BNNP Sumatera Barat dan BNNK jajaran dengan stakeholder dan pemegang kebijakan.
- c. Komitmen yang tinggi dari petugas rehabilitasi dalam mengikuti kegiatan untuk mengembangkan potensinya dalam memberikan pelayanan rehabilitasi

**HASIL UJI KOMPETENSI KONSELOR ADIKSI  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
TANGGAL 13 NOVEMBER 2023 DI JAKARTA**

<b>No.</b>	<b>Nama Peserta</b>	<b>Instansi</b>	<b>Hasil Asesmen *)</b>
1.	Mailisafitri, S.K.M	BNNP Sumatera Barat	Kompeten
2.	Sovia, A.M.K	BNNP Sumatera Barat	Kompeten
3.	Gerry Willyando	BNNP Sumatera Barat	Kompeten
4.	Sandreza	BNNP Sumatera Barat	Kompeten

<b>7.</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika</b>
-----------	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>1.</b>	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	1 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	100

Definisi operasional dari jumlah Lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) di wilayah Provinsi Sumatera Barat adalah Lembaga rehabilitasi yang telah memperoleh intervensi peningkatan kemampuan oleh BNN

dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi standar layanan.

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah Lembaga rehabilitasi narkoba yang telah mampu mempertahankan dan memenuhi standar layanan dalam satu tahun anggaran.

Petugas rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Barat akan melakukan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan layanan di Lembaga milik BNN dan mitra BNN agar memenuhi SPM berupa supervisi program, supervisi klinis, dan asistensi.

Sedangkan komponen SPM meliputi sebagai berikut :

- a. Komponen identitas dan data demografi (berupa data umum Lembaga rehabilitasi yang mencakup dasar hukum pendirian Lembaga rehabilitasi, jenis layanan yang diberikan, hingga metode layanan yang digunakan dalam proses rehabilitasi penyalahguna narkoba);
- b. Komponen penilaian umum ( berupa kelembagaan, pelayanan , monitoring dan evaluasi, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM);
- c. Komponen penilaian khusus ( berupa jenis layanan, rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial).

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan petugas rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Barat , Lembaga yang memenuhi standar pelayanan minimal di wilayah Provinsi Sumatera Barat adalah **Yayasan Karunia Insani Cabang Sumbang dan Klinik Intan Sari**.

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
2.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi	6 Unit	10 Unit	10 Unit	100

Definisi operasional dari unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi adalah unit atau kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalahguna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya.

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah berbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/ atau pecandu narkoba di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Indikator kinerja Jumlah Unit Penyelenggara layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) mengalami kenaikan sebanyak 10 Unit, antara lain

**Tabel 9.**  
**Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)**  
**di Provinsi Sumatera Barat TA. 2023**

No	Satker	Lokasi IBM	Target Klien (Orang)	Realisasi Klien (Orang)
1	BNN Provinsi Sumatera Barat	Kel Indarung Kec.Lubuk Kilangan	5 orang	5 orang
		Nagari Buayan Kec. Batang Anai	5 orang	5 orang
2	BNN Kota Payakumbuh	Kel.Balai Tongah Koto Kec. Payakumbuh Utara	10 orang	10 orang
		Kel.Koto Panjang Dalam Kec. Lamposi Tigo Nagori	10 orang	10 orang
3	BNN Kota Sawahlunto	Desa Kolok nan Tuo Kec. Barangin	8 orang	4 orang
		Desa Talawi Hilir Kec. Talawi		3 orang
4	BNN Kabupaten Solok	Nagari Gaung Kec. Kubuh	15 orang	15 orang
		Nagari Saok Laweh Kec. Kubung	15 orang	15 orang
5	BNN Kabupaten Pasaman Barat	Nagari Muaro Kiawai Kec. Gunung Tuleh	15 orang	15 orang
		Nagari Rabi Jonggor Kec. Gunung Tuleh	15 orang	15 orang
<b>TOTAL</b>			<b>98 Orang</b>	<b>97 Orang</b>

Dalam upaya pelaksanaan layanan intervensi masyarakat BNNP Sumatera Barat dan jajarannya memiliki target 10 unit / lokasi dan jumlah klien sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) klien. Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dirancang

dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. IBM melakukan pendekatan rehabilitasi dalam bentuk sederhana dengan ambang batas rendah ( low threshold), yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan persyarakat untuk terlibat didalamnya.

Adapun faktor keberhasilan dalam pencapaian indikator jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi Sumatera Barat adanya dukungan dari Lurah/ Wali Nagari/ Camat serta komponen masyarakat dalam pembentukan lokasi unit dalam pelaksanaan program IBM serta komitmen yang tinggi dari pimpinan, pelaksana kegiatan dan stakeholder terkait melakukan penguatan kepada penyedia layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).

Sedangkan Faktor kegagalan dalam pencapaian indikator jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan tidak tercapainya jumlah klien karena domisili klien yang berpindah saat pelaksanaan program serta ketakutan akan stigma bagi pecandu/penyalahguna narkoba.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya :

1. Sinkronisasi jadwal kegiatan antara agen pemulihan (AP) dengan klien dan petugas BNNP dan BNNKab/Kota;
2. Jarak lokasi penyelenggaran kegiatan IBM yang cukup jauh;

Langkah - langkah antisipatif yang akan dilakukan adalah : Memotivasi agen pemulihan untuk tetap mendampingi klien, serta berkoordinasi dengan aparaturn pemerintah setempat dalam mendukung kegiatan IBM.

<b>8.</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba</b>
-----------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
<b>1.</b>	Indeks kepuasan layanan Rehabilitasi narkoba	3,327 Indeks	3,1 Indeks	3,40 Indeks	109

Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi. Pengukuran Indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

Pelaksanaan kajian penerima layanan rehabilitasi ini dilaksanakan pada tanggal Juni dan Oktober 2023 dengan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari layanan rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Provinsi Sumatera Barat. Proses pengumpulan data dilaksanakan serentak di seluruh klinik pratama BNNP dan BNNK se Indonesia, dan di akomodir oleh Direktorat Pascarehab BNN bersama konsultan penelitian. Setelah data terkumpul, pihak Dir. Pasca dan Konsultan melaksanakan *cleaning* data sebelum dilanjutkan ke tahap analisis data.

Pada tahun 2023 BNN Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rehabilitasi narkotika rawat jalan kepada 113 orang pecandu di Klinik Pratama BNN Provinsi Sumatera Barat. Secara keseluruhan nilai dari Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk layanan rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Provinsi Sumatera Barat bernilai **Baik** dengan nilai 3,44 (untuk skala 4).

**Tabel 10.**  
**Hasil Survey Kajian Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi di BNNP Sumatera Barat dan jajarannya TA. 2023**

No	Satker	IKM	Kategori
1	BNNP Sumbar	3,40	Baik
2	BNN Kota Payakumbuh	3,64	Sangat Baik
3	BNN Kota Sawahlunto	3,23	Baik
4	BNN Kabupaten Solok	3,74	Sangat Baik
5	BNN Kabupaten Pasaman Barat	3,06	Baik
<b>TOTAL SUMATERA BARAT</b>		<b>3,44</b>	

Evaluasi indikator kinerja dilihat dari penilaian berdasarkan pengisian survei kepuasan layanan terhadap klien Klinik Pratama BNNP Sumatera Barat

Faktor keberhasilan dalam pencapaian target Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Barat adalah : pelaksanaan rehabilitasi tidak dipungut biaya , pelaksanaan layanan rehabilitasi dilaksanakan sesuai prosedur.

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia;
2. Latar Belakang pendidikan klien berpengaruh terhadap pemahaman klien mengenai pertanyaan di link survey yang diberikan.

<b>9.</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya</b>
-----------	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
<b>1.</b>	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	32 Berkas perkara	22 Berkas perkara	41 Berkas perkara	186

Berkas perkara tindak pidana peredaran gelap narkoba yang P.21 adalah berkas perkara penyidikan terasangka tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yagn dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan.

Pengukurannya menggunakan cara mengakumulasi jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkotika yagn terjadi pada selain wilayah interdiksi yagn dinyatakan lengkap oleh Jaksa penelita (P-21) untuk dilakukan penuntutan dari unit Pusat dan Vertikal.

Target yang ditetapkan pada indikator kinerja jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P.21 adalah 22 berkas perkara dan realisasi 41 berkas perkara, sehingga capaian kinerjanya adalah 186 %. Terdapat 9 berkas perkara Tahun 2022 yang penyelesaiannya di Tahun 2023. Dan masih terdapat 6 berkas perkara yang dalam proses P.21 pada BNNP Sumbar dan BNNKab/Kota di Tahun 2024. Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Satker	Target	Realisasi P21 (berkas perkara)	Berkas Tahun 2022 yang P21 di Tahun 2023	Berkas Yang masih dalam proses (lanjut 2024)
1	BNNP Sumbar	10	21	9	5
2	BNNK Payakumbuh	4	9		NIHIL
3	BNNK Sawahlunto	3	7		NIHIL
4	BNNK Solok	2	1		1
5	BNNK Pasbar	3	3		NIHIL
<b>Total</b>		<b>22</b>	<b>41</b>		

Adapun faktor keberhasilan capaian tersebut diantaranya: kerjasama dengan personil yang berkomitmen memberantas peredaran gelap narkoba.

Langkah-langkah tindak lanjut yang dilakukan diantaranya:

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM melalui pelatihan penyidik, pelatihan analis wiretapping
2. Terdapat berkas perkara yang masih dalam proses P21 sebanyak : 5 Berkas BNNP Sumbar dan 1 Berkas pada BNN Kabupaten Solok yang akan diselesaikan di Tahun 2024.

<b>10.</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika</b>
------------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.	Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100
2.	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100

Tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan adalah Kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketertiban kesehatan tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan seperti halnya tidak

ada tahanan kabur, cedera serius bahkan yang menyebabkan kematian dan hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas.

Pengukurannya dengan mendata kejadian tahanan yang kabur, kejadian perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan kejadian hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas di lingkungan Rumah Tahanan BNN. Adapun rumus penghitungan indikator kinerja ini sebagai berikut :

K3T = Nilai Keamana, Ketertiban dan Keselamatan Tahanan

a= Jumlah tahanan yang kabur

b= Jumlah tahanan yang menderita cedera serius atau kematian akibat perkelahian

c= Jumlah tahanan yang meninggal akibat kelalaian petugas

Nilai Tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan berada pada rang 1 s.d 100. maka:

$$K3T = \left( \frac{\text{Jumlah seluruh tahanan} - (a+b+c)}{\text{Jumlah seluruh tahanan}} \times 100\% \right) \times 100$$

**Tabel 11.**  
**Jumlah Tahanan Masuk dan Tahanan Keluar pada Proses Penyidikan TA 2023.**

<b>BNNP/BNNK</b>	<b>Laporan Kasus</b>	<b>Tahanan Masuk</b>	<b>Tahanan Keluar</b>	<b>Keterangan Kesehatan</b>
<b>BNNP Sumbar</b>	LKN 3	3 Tersangka	3 Tersangka	Sehat
	LKN 6	2 Tersangka	2 Tersangka	Sehat
	LKN 7	2 Tersangka	2 Tersangka	Sehat
	LKN 8	3 Tersangka	3 Tersangka	Sehat
	LKN 10	1 Tersangka	1 Tersangka	Sehat
	LKN 11	2 Tersangka	2 Tersangka	Sehat
	LKN 17	1 Tersangka	1 Tersangka	Sehat
<b>BNNK Payakumbuh</b>	LKN 01	1 Tersangka	2 Tersangka	Sehat
	LKN 05	1 Tersangka	1 Tersangka	Sehat
	LKN 09	1 Tersangka	1 Tersangka	Sehat
	LKN 10	2 Tersangka	2 Tersangka	Sehat
	LKN 11	2 Tersangka	2 Tersangka	Sehat
	LKN 21	3 Tersangka	3 Tersangka	Sehat
<b>BNNK Sawahlunto</b>	LKN 2	3 Tersangka	3 Tersangka	Sehat
	LKN 3	1 Tersangka	1 Tersangka	Sehat
	LKN 20	3 Tersangka	3 Tersangka	Sehat

<b>BNNK Solok</b>	LKN 12	1 Tersangka	1 Tersangka	Sehat
	LKN 12	1 Tersangka	1 Tersangka	Sehat
<b>BNNK Pasaman Barat</b>	LKN 05	2 Tersangka	2 Tersangka	Sehat
	LKN 19	1 Tersangka	1 Tersangka	Sehat
<b>JUMLAH</b>		<b>36 Tersangka</b>	<b>36 Tersangka</b>	

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah tahanan yang masuk berbeda dengan jumlah tahanan yang keluar, dikarenakan beberapa kasus masih dalam proses sidik dan proses tahap I yang masih berlanjut pada tahun 2023. Namun dalam hal ini, tahanan dalam keadaan sehat tanpa ada cedera yang serius, sehingga capaian untuk nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan adalah 100%.

Tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika adalah kondisi keutuhan dan/atau kondisi penyusutan secara wajar pada barang bukti narkotika dan narkotika. Pengukurannya dilakukan dengan membandingkan data kondisi barang bukti narkotika dan non narkotika pada saat diterima dari penyidik dengan waktu dikeluarkannya untuk proses pemusnahan atau diserahkan terimakan untuk tahap penuntutan (tahap II).

Perhitungan kinerja nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika adalah:

Satuan pengukuran adalah per -BA penitipan dan BA pengeluaran.

Jika jumlah dan jenis barang bukti yagn tercantum dalam BA penitipan barang bukti dan BA pengeluaran, maka diperoleh nilai  $a = 1$ , jika terdaapt perbedaan baik jumlah maupun jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan dan BA pengeluaran, maka  $a=0$

KKB = Nilai Keamanan Barang Bukti

$a_1$  = unutk barang bukti 1;

$a_2$  = untuk barang bukti 2;

$a_y$  = dst

Nilai Tingkat keamanan barang bukti berada pada range 1 s.d 100

Maka :

$$KBB = \left( \frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_y}{y} \times 100\% \right) \times 100$$

**Tabel 12.**  
**Jumlah Barang Bukti Narkotika pada Proses Penyidikan 2023**

No	Satker	Barang Bukti Narkotika	Barang Bukti Masuk	Barang Bukti yang dimusnahkan & Penyisihan untuk Kepentingan Penyidikan		
				Labor	Pembuktian	Pemusnahan
1	BNNP Sumatera Barat	Shabu	2100,31 gr	0,61 gr	202,61 gr	1.897,09 gr
		Ganja	49.451,12 gr	6,23 gr	15169,41 gr	34.275,48 gr
		Extacy	6000 Butir	6 Butir	60 Butir	5934 Butir
2	BNNK Payakumbuh	Shabu	133,67 gr	1,31 gr	132,36 gr	-
		Ganja	395,360 gr	13,82 gr	381,54 gr	-
		Extacy	2,26 gr (7 Butir)	0,56 gr	1,7 gr	-
3	BNNK Sawahlunto	Shabu	0,39 gr	0,04 gr	0,35 gr	-
		Ganja	-	-	-	-
4	BNNK Solok	Shabu	4,86 gr	0,01 gr	4,85 gr	4,85 gr
		Ganja	-	-	-	-
5	BNNK Pasaman Barat	Shabu	5,07 gr	0,02 gr	5,05 gr	-
		Ganja	1,22 gr	0,09 gr	1,13 gr	-
		Sintetis	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>			<b>52.094,26 gr</b>	<b>52.094,26 gr</b>		

**Tabel 13.**  
**Jumlah Barang Bukti Non Narkotika pada Proses Penyidikan 2023**

No	Barang Bukti Non Narkotika	Keterangan
<b>BNN Provinsi Sumbar</b>		
1	1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung A12 Warna Hitam	SITA
2	1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Y20 Warna Putih	SITA
3	1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A12 Warna Biru	SITA
4	2 (Dua) Buah Karung Plastik Warna Putih	SITA
5	1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk Daihatsu Warna Putih Nopol Ba 1886 My	SITA
6	1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A17 Warna Biru	SITA

7	1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A57 Warna Hitam	SITA
8	1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A5 Warna Putih	SITA
9	2 (Dua) Buah Sedotan Plastik	SITA
10	1 (Satu) Set Alat Hisap Sabu Berupa Bong Yang Terbuat Dari Plast	SITA
11	1 (Satu) Buah Kaca Pirek Bekas Pakai Yang Didalamnya Terdapat Sisa Sabu	SITA
12	1 (Satu) Unit Mobil Jenis Toyota Avanza Warna Putih Nopol Ba 1105 Ld	SITA
13	1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A16 Warna Silver	SITA
14	1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Y22 Warna Silver	SITA
15	1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam	SITA
16	1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Cokelat	SITA
17	1 (Satu) Unit Mobil Jenis Toyota Avanza Warna Merah Maroon Nopol Ba 1174 Oh	SITA
18	1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam	SITA
19	1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Biru	SITA
20	1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam	SITA
21	1 (Satu) Lembar Stnk Mobil Avanza Nopol Ba 1174 Oh	SITA
22	1 (Satu) Buah Karung	SITA
23	3 (Tiga) Lembar Uang Tunai Rp. 50.000,- Berjumlah Rp. 150.000,-	SITA
24	1 (Satu) Lembar Uang Tunai Rp. 100.000,- Berjumlah Rp. 100.000,-	SITA
25	1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A02 Warna Hitam	SITA
26	1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Gold	SITA
27	1 (Satu) Unit Handphone Merk Realme C20 Warna Biru	SITA
28	1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A5s Warna Biru	SITA
29	1 (Satu) Buah Dompot Merk Levis Warna Hitam	SITA
30	1 (Satu) Buah Kartu Atm Bank Bni Atas Nama Irsyah Dwi Artarto Nomor 5264220092906191	SITA
31	1 (Satu) Unit Mobil Jenis Honda Mobilio Warna Abu-Abu Nopol Ba 1493 Gc	SITA
32	1 (Satu) Buah Tas Kain Warna Kuning Merk Alfamidi	SITA
33	1 (Satu) Unit Mobil Jenis Expander Warna Hitam Nopol Ba 1989 Xf	SITA
34	1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Gelap	SITA

35	1 (Satu) Lembar Stnk Mobil Jenis Expander Warna Hitam Nopol Ba 1989 Xf Atas Nama Fajri Maulana Piliang	SITA
36	1 (Satu) Buah Kaca Pirek Yang Didalamnya Terdapat Sisa Sabu	SITA
37	1 (Satu) Buah Tusuk Gigi Yang Terbuat Dari Plastik Warna Biru	SITA
38	1 (Satu) Bungkus Kotak Rokok Merk Sampoerna Mild	SITA
39	1 (Satu) Buah Tas Sandang Merk Navyclub Warna Hitam	SITA
40	1 (Satu) Helai Celana Jeans Pendek Warna Biru Merk Levis Strauss&Co	SITA
<b>No</b>	<b>Barang Bukti Non Narkotika</b>	<b>Keterangan</b>
<b>BNN Kota Payakumbuh</b>		
<b>1</b>	1 (satu) unit handphone merk OPPO seri A5 warna hitam.	SITA
2	1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam fariasi merah Nomor Polisi BA 4667 MA berserta kunci kontaknya.	SITA
3	1 (satu) helai celana Jean warna Abu - Abu Merk X- Trail.	SITA
4	1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah.	SITA
5	1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat POP warna hitam Nomor Polisi BH 6613 UM.	SITA
6	3 (tiga) Pack plastik bening.	SITA
7	1 (satu) unit timbangan digital merk CONSTANT.	SITA
8	1 (satu) unit Mobil Suzuki Escudo warna hitam Noomor Polisi BA 1091 BZ berserta kunci kontak dan surat tanda nomor kendara (STNK).	SITA
9	1 (satu) dompet emas warna hitam putih merk MCM.	SITA
10	1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam.	SITA
11	1 (satu) unit handphone merk OPPO warna sliver.	SITA
12	1 (satu) unit bong lengkap terbuat dari botol minuman larutan penyegar.	SITA
13	2 (dua) pack plastik bening.	SITA
14	1 (satu) unit sendok terbuat dari sedotan minuman.	SITA
15	1 (satu) unit timbangan digital.	SITA
16	1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah.	SITA
17	1 (satu) dompet emas.	SITA
18	Uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).	SITA
19	1 (satu) unit handphone Nokia warna biru.	SITA
20	1 (satu) Unit mobil Avanza warna merah dengan Nomor Polisi BM 1959 PH berserta kunci kontak dan surat tanda nomor kendara (STNK).	SITA
21	1 (satu) unit handphone XIOMI warna hitam.	SITA
22	1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merk Sempurna Mild.	SITA
23	1 (satu) buah kotak kardus kecil merk STELLA warna hitam.	SITA
24	3 (tiga) buah sendok SABU yang terbuat dari pipet plastik warna hitam.	SITA
25	1 (satu) set alat hisap SABU berupa bong terbuat dari botol plastik minuman bekas merk Larutan CAP KAKI TIGA warna hijau kuning.	SITA
26	10 (sepuluh) buah kaca pirek.	SITA

27	2 (dua) buah korek api warna merah dan kuning tanpa merk.	SITA
28	1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY warna hitam.	SITA
29	1 (satu) buku catatan bergaris merk Okey.	SITA
30	Uang tunai sejumlah Rp. 850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).	SITA
31	1 (satu) pack plastik klip ukuran sedang berjumlah 84 (delapan puluh empat) lembar.	SITA
32	2 (dua) pack plastik klip ukuran sedang berjumlah 132 (seratus tiga puluh dua) lembar.	SITA
33	1 (satu) pack plastik klip ukuran sedang berjumlah 62 (enam puluh dua) lembar.	SITA
34	4 (empat) pack plastik klip ukuran kecil berjumlah 436 (empat ratus tiga puluh enam) lembar.	SITA
35	1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A11 warna hitam.	SITA
36	1 (satu) helai celana Jeans panjang warna biru merk LEVI'S trauss.	SITA
37	1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A22 warna hitam.	SITA
<b>No</b>	<b>Barang Bukti Non Narkotika</b>	<b>Keterangan</b>
	<b>BNN Kota Sawahlunto</b>	
<b>1</b>	1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dengan IMEI 1 : 354668775465350/01 dan IMEI 2 : 358183415465352/01	SITA
2	1 (satu) buah korek api gas warna hijau	SITA
3	2 (dua) buah kaca pirek	SITA
4	1 (satu) buah tutup botol warna hijau dengan sedotan yang melekat	SITA
5	4 (empat) buah sedotan plastik kecil	SITA
6	1 (satu) buah gulungan timah rokok	SITA
7	1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang diikat karet warna hijau dan merah	SITA
8	1 (satu) unit HP merek Nokia warna silver dengan IMEI 1 : 356048080225005/80 dan IMEI 2 : 356048080225013/80	SITA
9	1 (satu) unit HP merek OPPO warna hijau metallic dengan IMEI 1 : 869778042622390 dan IMEI 2 : 869778042622382	SITA
10	1 (satu) unit Kendaraan, Merek Honda Megapro Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1KC3118BK084949 dan Nomor Mesin : KC31ETQB4688	SITA
11	1 (satu) unit Handphone, Merk Realme warna hitam dengan IMEI 1 : 863227049354256 dan IMEI 2 : 863227049354249	SITA
12	1 (satu) unit Handphone, Samsung Lipat warna hitam dengan NO IMEI : 352929 05 518272/3	SITA
13	1 (satu) unit Alat Narkotika, timbangan digital warna silver tanpa merk ukuran sedang dilengkapi 2 (dua) buah baterai panasonic terpasang	SITA
14	1 (satu) unit Alat Narkotika, timbangan digital silver tanpa merk ukuran kecil	SITA
15	1 (satu) buah Alat Narkotika, kaca pirek	SITA
16	1 (satu) buah Alat Narkotika, pak plastik klip warna bening merk c-tik	SITA
17	1 (satu) buah Alat Narkotika, plastik klip warna bening merk c-tik	SITA
18	1 (satu) buah Alat Narkotika, korek api gas warna hijau	SITA
19	2 (dua) buah Alat Narkotika, pipet ukuran sedang (sendok takar)	SITA
20	3 (tiga) buah Alat Narkotika, pipet plastik kecil	SITA
21	1 (satu) buah Alat Narkotika, gulungan timah rokok	SITA

22	1 (satu) pecahan Uang, Rp. 100.000,-	SITA
No	Barang Bukti Non Narkotika	Keterangan
<b>BNN Kabupaten Solok</b>		
1	1 (satu) buah sendok takar warna hitam	SITA
2	2 (dua) buah mencis warna putih merk Lucky Strike dan warna hitam merk Djarum Black	SITA
3	1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam	SITA
4	1 (satu) helai tisu	SITA
5	1 (satu) helai plastik warna hitam	SITA
6	1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam yang didalamnya terpasang nomor SIMCARD 082387036595	SITA
7	1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan nomor IMEI1 860483062267973 dan nomor IMEI2 860483062267965 yang di dalamnya terpasang nomor SIMCARD 082289634069	SITA
No	Barang Bukti Non Narkotika	Keterangan
<b>BNN Kabupaten Pasaman Barat</b>		
1	1 (satu) set alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol kaca warna merah muda	SITA
2	1 (satu) unit timbangan digital warna silver tanpa merek	SITA
3	1 (satu) buah kotak kecil warna biru	SITA
4	1 (satu) buah jarum suntik	SITA
5	1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna bening	SITA
6	2 (dua) plastik klip warna bening ukuran sedang	SITA
7	2 (dua) plastik klip warna bening ukuran kecil	SITA
8	1 (satu) buah kotak plastik warna putih tanpa merek	SITA
9	1 (satu) unit handphone merk Realme C3 warna merah dengan nomor IMEI : 868738042953097 ; 868738042953089 yang didalamnya terpasang kartu Telkomsel dengan nomor: 082267286148	SITA
10	1 (satu) unit handphone merk Samsung A02S warna hitam dengan nomor IMEI : 352432722678835 ; 358365662678833 yang didalamnya terpasang kartu Telkomsel dengan nomor: 082211991311	SITA
11	1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat merk Toyota Agya warna Putih dengan plat nomor: BA 1430 SQ beserta Kunci dan STNK atas nama pemilik SURYATI No. 10929891 dengan Nomor Rangka: MHKA4DA3JEJ036770 dan Nomor Mesin: 1KRA114309	SITA
12	1 (satu) lembar print out screenshot percakapan Whatsapp atas nama Sambu01 tanggal 21 Februari 2023 pukul 17.19 WIB, Pukul 17.49 WIB dan Pukul 18.47 WIB yang terdapat di dalam handphone milik YOSRIZAL Pgl YOS Bin M.NASIR merk Realme C3 warna merah dengan nomor IMEI : 868738042953097 ; 868738042953089 yang didalamnya terpasang kartu Telkomsel dengan nomor: 082267286148	SITA
13	1 (satu) unit handphone merk OPPO CPH2209 warna biru dengan nomor IMEI 860768061512530; 860768061512522 yang didalamnya terpasang kartu telkomsel nomor: +6281250929770	SITA

14	1 (satu) lembar print out screenshot percakapan Whatsapp atas nama Ijep tanggal 23 Februari 2023 yang terdapat di dalam handphone milik YELFI NALDI Pgl IYEL Bin SARUDIN merek OPPO CPH2209 warna biru dengan nomor IMEI 860768061512530; 860768061512522 yang didalamnya terpasang kartu telkomsel nomor: +6281250929770	SITA
15	1 (satu) unit timbangan elektronik merek CHQ HWH warna hitam	SITA
16	1 (satu) unit handphone merek OPPO CPH1923 warna merah dengan nomor IMEI : 864983050470832 ; 864983050470825 yang didalamnya terpasang kartu Telkomsel dengan nomor : 082375529030	SITA

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa capaian untuk nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika adalah 100%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah barang bukti yang diterima dari penyidik dengan yang dikeluarkan (dimusnahkan dan penyisihan) untuk kepentingan penyidikan adalah sama.

Faktor yang mendukung keberhasilan capaian target yaitu pelaksanaan kegiatan pengawasan tahanan dan barang bukti yang efektif, efisien dan tepat sasaran serta komitmen yang tinggi dari pimpinan dan bidang pemberantasan BNNP Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan tahanan dan barang bukti . Namun permasalahan dalam pencapaian target saat ini belum adanya tempat penyimpanan yang memenuhi standar

Dalam mengatasi permasalahan tersebut langkah-langkah tindak lanjut yang dilakukan yaitu peningkatan Kelengkapan Sarana dan Prasarana untuk menjaga keamanan barang bukti.

<b>11.</b>	<b>Sasaran : Meningkatkan proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien</b>
------------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

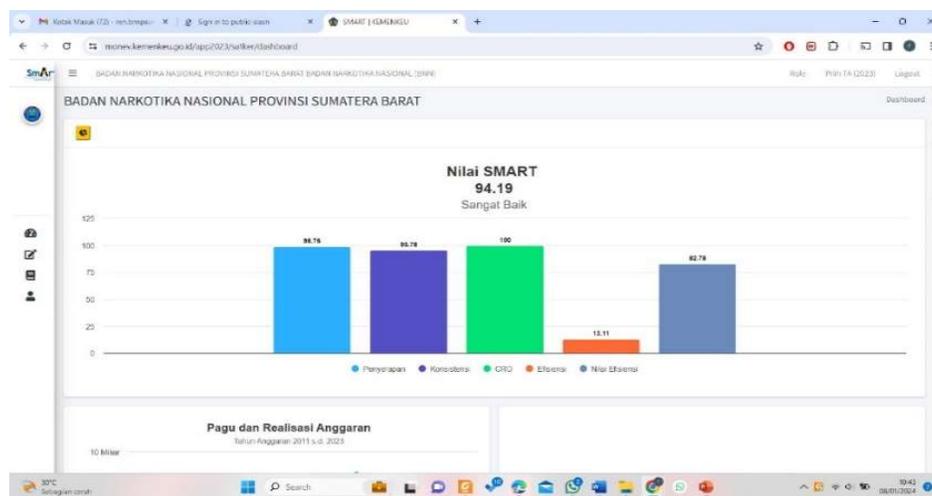
No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Sumatera Barat	82,21	83	94, 19	113
2.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	1 kabupaten/ kota	4 kabupaten /kota	2 kabupaten/ kota	50

Nilai kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNNP Sumatera Barat yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks.

Pengukuran nilai kinerja anggaran BNN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan.

**Tabel 14.**  
**Penghitungan Nilai Kinerja Anggaran BNNP Sumatera Barat TA. 2023**

No	BNNP/BNNK	Nilai Kinerja Anggaran (Capaian Aplikasi Smart Kemenkeu per 31 Des 2023)
1	BNNP Sumbar	94,19
2	BNN Kota Payakumbuh	86,56
3	BNN Kota Sawahlunto	87,17
4	BNN Kabupaten Solok	84,27
5	BNN Kabupaten Pasaman Barat	84,84



BNNP Sumatera Barat terdiri dari :

1. Capaian RO : 100 %
2. Efisiensi : 13,11 %
3. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan : 95,78 %
4. Penyerapan anggaran : 98,76 %

Dibandingkan dengan tahun 2022 nilai kinerja anggaran BNNP Sumatera Barat tahun 2023 mengalami kenaikan. Adapun yang menjadi kendala tidak tercapainya nilai kinerja pada BNNP Sumatera Barat dan BNNKab/Kota adalah belum memahami sepenuhnya penilaian indikator efisiensi pada Aplikasi Smartkemenkeu.

Dapat disimpulkan pada indikator Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target pada BNNP Sumatera Barat 2 Kab/ Kota tercapai untuk tahun 2023 ini. Sedangkan yang tidak tercapai pada BNN Kota Payakumbuh dan BNN Kabupaten Pasaman Barat.

<b>12.</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya tata Kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur</b>
------------	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Sumatera Barat	97,06 Indeks	92 Indeks	96,93 Indeks	105
2.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 kabupaten/ kota	4 kabupaten/ kota	4 kabupaten/ kota	100

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdapat reformulasi indikator Capaian Output yaitu adanya perubahan nomenklatur dari Konfirmasi Capaian Output menjadi Capaian Output. Perhitungan Capaian Output ini dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO. Selain itu juga terdapat penyesuaian bobot 3 (tiga) aspek dengan 8 (delapan) indikator sebagai berikut :

- **Kualitas Perencanaan Anggaran**  
Merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Terdiri dari indikator Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA
- **Kualitas Pelaksanaan Anggaran**  
Merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Indikatornya meliputi Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Taguhan, Pengelolaan Uang Persediaan dari Tambahan Uang Persediaan.
- **Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran**  
Merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Indikator yang ada pada aspek ini yaitu Capaian Output.

Tahun ini mengalami penurunan nilai dari tahun 2022. Nilai Indikator Kinerja tersebut diperoleh dari Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker pada Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM-SPAN). Maka capaian target IKPA BNN Provinsi Sumatera Barat adalah 105 %.

Sedangkan untuk jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target sebanyak 4 kabupaten/kota, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 15.**  
**Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Sumatera Barat dan BNNKab/kota Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>BNNP/BNNK</b>	<b>Nilai IKPA (Capaian Aplikasi Smart Kemenkeu per 31 Des 2023)</b>
1	BNNP Sumbar	96,93
2	BNN Kota Payakumbuh	98,11
3	BNN Kota Sawahlunto	97,94
4	BNN Kabupaten Solok	94,75
5	BNN Kabupaten Pasaman Barat	93,36

Langkah yang dilakukan untuk meningkatkan Kinerja sebagai berikut :

- a. Peningkatan koordinasi, pembinaan teknis dan kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah, swasta, organisasi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan P4GN.
- b. Peningkatan kualitas SDM baik struktural maupun fungsional melalui pelatihan/diklat.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional.

<b>13.</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Vertikal</b>
------------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>1.</b>	Nilai Zona Integritas BNN PProvinsi Sumatera Barat Berdasarkan Penilaian Internal		75 Indeks	71,22 Indeks	94,96 %

Berdasarkan hasil penilaian internal pada tahun 2023 BNN Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai sebesar 71, 22 atau 94, 96 % dari target yang ditetapkan sebesar 75. Hasil evaluasi tahun 2023, BNN Provinsi Sumatera Barat terus meningkatkan kualitas Pembangunan Zona Integritas guna capaian target di tahun 2024. Hasil penilaian pelaksanaan pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan BNN yakni, Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Adapun kendala / hambatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada BNN Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Perubahan regulasi terkait evaluasi PMPRB;
2. Perbedaan persepsi dalam menerjemahkan regulasi terkait RB;
3. Belum adanya unit kerja khusus yang mengkoordinir pelaksanaan RB;
4. Keterbatasan SDm yang menangani RB;
5. Monitoring dan evaluasi rencana aksi belum dilaksanakan secara berkala.

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 16.175.370.000,-** pada tahun 2023 yang berasal dari dana APBN.

**Tabel 16.**  
**Alokasi Anggaran BNNP Sumatera Barat TA. 2023**

<b>NO.</b>	<b>JENIS BELANJA</b>	<b>PAGU PER JENIS BELANJA</b>	<b>REALISASI TAHUN 2022</b>	<b>SISA ANGGARAN</b>
1.	Belanja Pegawai	4.076.962.000	4.037.781.726	39.180.274.
2.	Belanja Barang	11.896.173.000	11.676.228.171	219.944.829
3.	Belanja Modal	202.235.000	200.571.875	1.663.125
<b>TOTAL</b>		<b>16.175.370.000</b>	<b>15.914.581.772</b>	<b>260.788.228</b>

Dari tabel di atas dapat diketahui realisasi anggaran BNNP Sumatera Barat tahun 2023 guna mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di daerah adalah sebesar **Rp.16.914.581.772,-** atau sebesar **98, 39 %** dari total anggaran.

Jika dilihat dari sumber dana alokasi anggaran BNNP Sumatera Barat Tahun 2023 adalah :

**Tabel 17.**  
**Alokasi Anggaran BNNP Sumatera Barat TA. 2023 Berdasarkan Sumber Dana**

<b>NO.</b>	<b>SUMBER DANA</b>	<b>ALOKASI ANGGARAN</b>	<b>REALISASI TAHUN 2023</b>	<b>SISA ANGGARAN</b>
1.	APBN	15.793.132.000	15.533.003.977	260.128.023
2.	HIBAH	382.238.000	381.577.795	660.205

### **C. EFISIENSI PENGGUNA SUMBER DAYA**

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatera Barat sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Penggunaan Sistem Informasi Berbasis Elektronik (SPBE)

BNN Provinsi Sumatera Barat telah menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) upaya pengintegrasian dalam pelaksanaan birokrasi dan pemberian layanan publik birokrasi sehingga terciptanya economic of scale

2. Efisiensi Anggaran

BNN Provinsi Sumatera Barat ikut menjalankan kebijakan pencadangan anggaran ( automatic adjustment) yang dialokasikan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dalam rangka mempertimbangkan kondisi geopolitik global. Efisiensi penyisihan anggaran BNN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebesar Rp 711.050.000,-



**BAB IV  
PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan dengan harapan dapat berperan sebagai alat kendalai guna mengetahui kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*). Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Provinsi Sumatera Barat telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2023.

Capaian Kinerja BNNP Sumatera Barat tahun 2023 merupakan sinergitas kinerja dari Kegiatan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Rehabilitasi dan Kegiatan Pemberantasan dan Intelijen serta Bagian Umum yang berpengaruh terhadap capaian keberhasilan tugas BNNP Sumatera Barat dalam menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks di Bidang P4GN.

a. Kegiatan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- Jumlah kabupaten / kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Provinsi , target 4 kabupaten/kota tercapai 3 kabupaten/kota;
- Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Provinsi, target 4 kab/kota tercapai 4 kab/kota;
- Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah Provinsi, target 4 kab/kota tercapai 4 kab/kota;
- Jumlah Kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "bahaya" menjadi "waspada", target 1 kawasan tercapai 1 kawasan;
- Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi, target 2,6 Indeks tercapai 3, 55 Indeks.

b. Kegiatan Rehabilitasi terdiri dari 6 ( enam) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- Persentase Penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup target 50 % tercapai 56 %;
- Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih, target 50 orang tercapai 60 orang;

- Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis, target 2 orang tercapai 4 orang;
  - Jumlah Lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi, target 2 lembaga tercapai 2 lembaga;
  - Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi target 10 Unit tercapai 10 Unit;
  - Indeks Kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Barat, target 3,1 Indeks tercapai 3,40 Indeks.
- c. Kegiatan Pemberantasan dan Intelijen terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 target 22 berkas perkara tercapai 32 berkas perkara.
  - Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan, target 100 tercapai 100.
  - Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba, target 100 tercapai 100.
- d. Kegiatan Umum terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Sumatera Barat , target 83 % tercapai 94,19 %;
  - Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target, target 4 kabupaten/kota , tercapai 2 kabupaten/kota dikarenakan ada output yang tidak tercapai;
  - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Sumatera Barat target 92 Indeks tercapai 96,93 Indeks;
  - Jumlah BNN Kabupaten /Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target, target 4 kabupaten/kota tercapai 4 kabupaten/kota.
  - Nilai Zona Integritas BNN PProvinsi Sumatera Barat Berdasarkan Penilaian Internal belum mencapai target, target 75 dan tercapai 71, 22.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatera Barat sepanjang tahun 2023 bagi masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan. Capaian kinerja BNN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, telah dilakukan dengan upaya yang optimal dan dukungan

dari seluruh lapisan masyarakat guna mensukseskan program P4GN di daerah.  
**Indonesia Bersinar**

**Padang, 29 Februari 2024**  
**Kepala Badan Narkotika Nasional**  
**Provinsi Sumatera Barat**



**Tri Julianto Djatiutomo, S.I.K.,M.M**